



## Pokok Pendidikan di Indonesia

**Andre Fauzan<sup>1\*</sup>, Vilsi Kholilah<sup>2</sup>, Novia Dwi Ferlita<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Alamat : Jl.Prof.Dr.Mahmud Yunus,Lubuk Lintah,Padang

Korespondensi penulis : [andre465@gmail.com](mailto:andre465@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [vilsikhollillah@gmail.com](mailto:vilsikhollillah@gmail.com)<sup>2</sup>, [noviadwiferlita@gmail.com](mailto:noviadwiferlita@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** Education in Indonesia is one of the crucial sectors for national development. This article examines the key aspects of education in Indonesia, including the legal foundations, education policies, the education system, and the challenges faced in implementing education across the country. The discussion begins with an analysis of the National Education System Law (UUSPN) and how government policies, such as the 2013 curriculum, aim to improve the quality of education in Indonesia. This study also explores the important role of character education, the integration of technology in learning, and efforts to improve educational equity in remote areas. Based on a literature review and current statistical data, it is found that despite significant progress, Indonesia still faces major challenges, such as the quality disparity between urban and rural education, as well as limited access to higher education. Therefore, it is essential for the government and all stakeholders to continue efforts to enhance the quality and equity of education in Indonesia to achieve more inclusive and sustainable educational goals.

**Keywords :** educational , inclusive , UUSPN

**Abstrak:** Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Artikel ini mengkaji pokok-pokok pendidikan di Indonesia, meliputi dasar hukum, kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pembahasan dimulai dengan analisis tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah, seperti kurikulum 2013, berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran penting pendidikan karakter, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta upaya peningkatan pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Berdasarkan studi literatur dan data statistik terkini, ditemukan bahwa meskipun telah banyak kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah urban dan pedesaan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** pendidikan , inklusif , UUSPN

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pendidikan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi. Sejak Indonesia merdeka, sektor pendidikan terus mengalami perubahan dan perkembangan, baik dari segi kebijakan, kurikulum, maupun infrastruktur yang mendukungnya. Pendidikan yang baik bukan hanya akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan

Pokok pendidikan di Indonesia memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah dan budaya bangsa. Dari zaman kolonial hingga pasca-kemerdekaan, pendidikan di Indonesia telah melalui berbagai perubahan, baik dalam hal aksesibilitas, kualitas, maupun pemerataan. Meskipun ada berbagai pencapaian, tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia tetap ada dan terus berkembang. Diantaranya adalah masalah ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pembelajaran.

Selain itu, pokok pendidikan di Indonesia juga harus mampu menanggapi tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Pendidikan yang berbasis pada penguasaan teknologi dan keterampilan abad ke-21 menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi dunia yang semakin terhubung dan penuh dengan persaingan. Dalam hal ini, pendidikan di Indonesia dituntut untuk mampu membentuk karakter bangsa yang unggul, berkepribadian, dan memiliki nilai-nilai moral yang baik, sesuai dengan cita-cita nasional yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengulas berbagai pokok permasalahan pendidikan di Indonesia, mulai dari kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, hingga tantangan dan solusi yang perlu dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Harapannya, melalui kajian ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi pendidikan di Indonesia dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam pokok-pokok pendidikan di Indonesia, termasuk kebijakan pendidikan, implementasinya, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan teknik studi literatur dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena pendidikan di Indonesia melalui berbagai sumber informasi yang relevan. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai teori-teori pendidikan, kebijakan pendidikan nasional, serta perkembangan sistem pendidikan Indonesia sepanjang waktu. Sumber literatur yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, laporan tahunan, dokumen kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Selain itu, wawancara mendalam akan dilakukan dengan

informan kunci yang terdiri dari praktisi pendidikan, akademisi, pejabat pemerintah, serta pengambil kebijakan di bidang pendidikan, guna menggali pandangan dan pengalaman mereka mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Wawancara ini akan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai isu yang muncul selama percakapan, dengan tujuan mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam sistem pendidikan Indonesia. Data yang terkumpul dari wawancara kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan literatur. Selanjutnya, tema-tema ini akan dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menerapkan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan temuan dari wawancara, literatur, dan sumber lainnya. Proses penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu enam bulan, dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur selama dua bulan pertama, dilanjutkan dengan wawancara dan pengumpulan data primer selama dua bulan berikutnya, dan terakhir tahap analisis data serta penyusunan laporan penelitian dalam dua bulan terakhir. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang kondisi pendidikan di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Permasalahan Pendidikan di Indonesia**

Salah satu tujuan dari kehidupan bernegara di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan kehidupan bangsa tersebut tentunya melalui berbagai upaya, terutama dengan fokus pada pendidikan, baik pendidikan formal , nonformal, maupun informal. Namun upaya untuk mendidik bangsa di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi banyak tantangan , tidak hanya kendala dalam bidang pendanaan pendidikan yang sangat terbatas, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya atau tenaga pendidik , wawasan pendidikan , dan pemahaman terhadap tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, baik Undang -undang No. 2 Tahun 1989 maupun Undang -undang No. 20 Tahun 2003 sebenarnya sudah cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih jauh dari harapan. Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak hanya terletak pada kekurangan dana, tetapi juga terletak pada pelaksana

pendidikan , kebijakan pendidikan , wawasan pendidikan , pemahaman mengenai tujuan pendidikan yang utuh, kelembagaan pendidikan , terutama yang dimiliki oleh swasta, dikotomi pendidikan , dan lain-lain. Dana dan fasilitas pendidikan pada kenyataannya masih sangat kurang, meskipun dana untuk pendidikan umum maupun pendidikan agama telah meningkat secara signifikan. Masalah pendidikan yang telah disebutkan di atas masih tetap ada, dan jika tidak ada perubahan dalam wawasan dan pemahaman mengenai tujuan pendidikan , maka permasalahan tersebut justru bisa semakin membesar seiring berjalannya waktu yang meningkatkan ego sektoral dalam mengelola pendidikan dengan dana yang melimpah . Kualitas Pendidikan yang saat ini sangat memprihatikan dibuktikan dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari tingkat pencapaian pendidikan, Kesehatan, dan pernghasilan per yang menunjukan, bahwa indeks pengembangan di Indonesia semakin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-105 (1998), ke109 (1999), dan ke-108 (2018). Kualitas Pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program ( PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori dari The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program. Dengan demikian, harapan untuk mengurangi dikotomi pendidikan di Indonesia tampak sulit untuk direalisasikan . Yang terjadi justru sebaliknya, dikotomi dalam pendidikan semakin meningkat sehingga diharapkan diharapkan adanya konsep pendidikan terpadu.

### **1) Permasalahan Wawasan dan Tujuan Pendidikan**

Masih banyak ditemukan di kalangan pemimpin lembaga pendidikan dan guru-guru di Indonesia yang memiliki pandangan kependidikan yang sempit. Dalam pendidikan umum, pendidikan sering dipahami hanya sebagai usaha untuk mencerdaskan otak semata-mata dengan tekanan pada penyampaian materi pelajaran untuk mengisi otak siswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan mereka kurang menekankan aspek agama (Imtaq). Sebaliknya, di beberapa lembaga pendidikan agama, siswa lebih ditekankan pada pendidikan Imtaq, tetapi kurang pada Iptek. Dengan demikian, kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia tidak mengarah pada keselarasan antara Imtaq dan Iptek . Sementara itu, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama pada umumnya, kurang menghasilkan lulusan yang terampil , sehingga setiap tahun masyarakatnya menambah jumlah kemiskinan

yang menjadi beban, baik bagi pemerintah maupun bagi . Hal ini berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Tidak adanya koordinasi dan kerja sama antara penyedia tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja , selain tentu saja berkaitan dengan masalah penyediaan lapangan kerja . Untuk bisa keluar dari permasalahan pendidikan di Indonesia ini, sebenarnya sudah cukup banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai ahli . Namun , konsep tersebut ternyata kurang ditanggapi secara positif dalam menentukan suatu kesepakatan. Yang terjadi justru cenderung menjadi arena terjadinya yang tak kunjung usai , sehingga apa yang diinginkan tetap saja sebagai wacana atau mimpi belaka . Sementara itu , di kalangan ahli pendidikan Islam sendiri juga belum tercipta suatu kesepakatan dalam konsep pendidikan Islam, meskipun sudah lama para ahli pendidikan Islam sedunia mengemukakan konsep pendidikan berupa sistem pendidikan Islam terpadu. Hal ini antara lain disebabkan karena sudah terbiasa dengan konsep pendidikan tradisional , atau terpengaruh oleh konsep pendidikan Barat yang mengandung dikotomi dalam sistem pendidikannya.

## 2) Permasalahan Dikotomi Pendidikan

Yang dimaksudkan dengan dikotomi pendidikan ialah pendidikan yang memisahkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama seperti yang terjadi di Barat. Hal ini dijelaskan oleh berbagai pakar, yang di antaranya oleh Rifyal Ka'bah yang menjelaskan bahwa dikotomi pendidikan yang bersumber dari Barat, tercermin pada dua jenis pendidikan, yaitu secular school atau sekolah sekuler, kontras dengan reli-gious school atau sekolah gereja atau keagamaan (1983: 93).

Sejalan dengan itu, Syed Sajjad Husain berpandangan bahwa dikotomi pendidikan di daerah Timur terlihat pada dua jenis pendidikan atau sistem pendidikan ganda: sistem pendidikan Islam tradisional melahirkan golongan Islam tradisional, dan sistem pendidikan sekular modern lembaga-lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pondok pesantren), di samping diberikan bidang studi agama, juga disediakan waktu untuk bidang studi umum. Namun menurut penilaian Malik Fajar penyediaan waktu bidang studi umum dan bidang studi agama di sekolah umum dan madrasah itu masih bersifat alokatif-dikotomis, karena waktunya masih terpisah sehingga dalam pemberian pelajaran bidang studi umum tidak dikaitkan dengan agama, dan dalam pembelajaran bidang studi agama tidak ditopang atau tidak dihubungkan dengan bidang studi umum.Sementara itu menurut Baiquni bahwa dikotomi pendidikan menjadi salah satu penghalang bangkitnya kembali umat Islam di dunia guna mampu memainkan peran

dalam seluruh bidang atau semua cabang ilmu pengetahuan. untuk menghapus dikotomi pendidikan idealnya dapat dimulai dan dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam, tetapi kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia kini masih saja berikut dengan persoalan dana yang sangat kecil dan masalah kuantitas tenaga kepedidikan, sehingga persoalan kualitas seperti keterpaduan antara Imtaq dan Iptek masih menjadi cita-cita, belum terwujud dalam bentuk program pendidikan yang secara nyata dilaksanakan. Masih banyak lagi permasalahan lain dari pendidikan di Indonesia ini seperti masalah partisipasi masyarakat dalam pependidikan (school based society), masalah manajemen sekolah (school based management) dan sebagainya, dan ternyata dalam pemecahan permasalahan pendidikan yang banyak tersebut sampai saat ini belum dapat diatasi, terutama bagi masyarakat yang masih awam terhadap konsep pendidikan yang ideal di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan pendidikan di Indo- nesia pada saat ini cenderung semakin sulit diatasi. Maka tidak heran jika kualitas pendidikannya berada di papan bawah dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara- negara Asia khususnya dan di dunia umumnya.

### **3) Pemerataan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia.**

Masalah pemerataan pendidikan merupakan tema tentang bagaimana sistem pendidikan dapat memberikan peluang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk mengakses pendidikan, sehingga pendidikan tersebut berfungsi sebagai alat untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada mulanya di negara kita, pemerataan pendidikan telah dinyatakan dalam UU No. 4 tahun 1950 sebagai landasan pendidikan dengan pengajaran di sekolah. Pada bab XI pasal 17 tertulis: "Setiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid di suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah itu terpenuhi . Selanjutnya, dalam konteks wajib belajar, bab VI pasal 10 ayat 1 menyatakan: "semua anak yang telah berumur 6 tahun berhak dan yang berumur 8 tahun diwajibkan untuk belajar di sekolah ."

### **4) kuantitas pendidikan di Indonesia**

Kuantitas merupakan isu yang berhubungan dengan jumlah murid yang perlu diakomodasi dalam sistem pendidikan atau sekolah. Isu ini muncul karena calon murid yang tidak dapat diterima di suatu sekolah, akibat dari kapasitas yang terbatas. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Masalah ini khususnya terjadi di SD pada tahun-tahun sebelumnya. Namun saat ini masalah tersebut telah bisa teratasi . Sisa masalah ini ada pada anak-anak yang tinggal

di daerah terpencil. Diharapkan (ideal): “pendidikan nasional dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan”. Kenyataan (realita): “masih banyak warga negara khususnya yang berada pada usia sekolah tidak terakomodasi di lembaga pendidikan (sekolah) yang ada” (sumber statistik pendidikan daerah dan nasional ). Permasalahannya adalah bagaimana sistem pendidikan yang dikelola agar dapat memberikan kesempatan seluas -luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

#### **5) Kualitas pendidikan di Indonesia.**

Kualitas pendidikan biasanya dinilai berdasarkan hasil pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Tingkat ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tujuan terkecil yaitu Tujuan Pembelajaran Spesifik (TKP)/Indikator Capaian Pembelajaran. Kualitas pencapaian TKP/indikator selanjutnya dapat mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran umum (TPU)/kompetensi dasar. Secara hierarki, tujuan yang lebih tinggi dapat diidentifikasi, seperti tujuan kurikulum (tujuan mata pelajaran/kursus), tujuan kelembagaan (lembaga pendidikan), dan tujuan pendidikan nasional. Tercapainya tujuan ini bergantung pada unit atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Kesulitan dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan terletak pada kurangnya alat pengukuran yang tepat, karena tidak ada ukuran standar keberhasilan anak di sekolah. Sistem evaluasi dapat menggunakan kriteria yang berbeda, seperti penilaian referensi normal (PAN) dan referensi patokan (PAP), yang menimbulkan tantangan dalam menetapkan tingkat kualitas sebenarnya. Kompleksitas ini membuat sulit untuk memahami makna sebenarnya dari masalah mutu pendidikan, terutama ketika evaluasi dilakukan oleh individu dengan kriteria yang berbeda-beda, sehingga membuat penilaian mutu menjadi misteri. Penafsiran mutu pendidikan dapat bervariasi antardaerah, dengan beberapa daerah menghadapi masalah mutu sementara daerah lainnya tidak. Pada akhirnya, persepsi kualitas pendidikan dapat bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga menjadikannya masalah yang menantang untuk diatasi.

#### **6) Relevansi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia**

Pendidikan yang dianggap (ideal) adalah ketika sistem pendidikan dapat menghasilkan keluaran (keluaran) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian (relevansi) ini mencakup baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) dari keluaran tersebut. Di sisi lain , keseimbangan ini seharusnya memiliki tingkat

keterkaitan (link) dan kesepadan (match). Pendidikan dinyatakan tidak atau kurang relevan jika tingkat keselarasan tersebut tidak ada atau minimal. Tingkat masalah ditentukan oleh tingkat keseimbangan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan tersebut . Jika tingkat kesesuaian tinggi, maka pendidikan dianggap relevan. Permasalahan akan semakin besar atau rumit ketika tingkat kesesuaian tersebut rendah.

### **Faktor yang mempengaruhi permasalahan pokok pendidikan di Indonesia**

Faktor yang mempengaruhi permasalahan perkembangan budaya dan seni serta laju pertumbuhan inspirasi masyarakat sangat kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan ini:

#### **1. Sosial dan Ekonomi**

Kondisi Ekonomi Keterbatasan finansial di suatu wilayah dapat menghalangi akses masyarakat terhadap pendidikan seni dan budaya. Masyarakat yang berada dalam kondisi finansial yang lemah cenderung memiliki peluang lebih sedikit untuk mengembangkan kreativitas dan berpartisipasi dalam kegiatan seni.

Perubahan Sosial: dalam struktur sosial, seperti urbanisasi, dapat berdampak pada cara masyarakat berinteraksi dengan Perubahan seni dan budaya . Urbanisasi sering kali membawa perubahan nilai dan norma yang dapat mempengaruhi cara seni dinikmati dan diproduksi ..

##### **a. Aspirasi Masyarakat**

Meningkatnya harapan masyarakat terhadap pendidikan dan seni dapat mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Masyarakat yang memahami pentingnya pendidikan dan seni dalam meningkatkan status sosial mereka akan lebih ter dorong untuk terlibat.

##### **b. Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan seni yang memadai sangatlah penting. Apabila lembaga pendidikan tidak memiliki sarana yang memadai, maka pengembangan seni dan budaya akan terhambat . Kualitas Pengajaran Perbandingan jumlah guru dan siswa yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan seni. Jika jumlah siswa terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah guru, maka perhatian yang diterima setiap siswa akan berkurang, yang berdampak pada kualitas pembelajaran seni.

##### **c. Budaya dan Tradisi**

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan seni yang memadai sangatlah penting. Apabila lembaga pendidikan tidak memiliki sarana yang memadai, maka

pengembangan seni dan budaya akan terhambat . Kualitas Pengajaran Perbandingan jumlah guru dan siswa yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan seni. Jika jumlah siswa terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah guru, maka perhatian yang diterima setiap siswa akan berkurang, yang berdampak pada kualitas pembelajaran seni

**d. Teknologi**

Akses Perkembangan teknologi dan komunikasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap seni dan budaya. Namun, ketidakmerataan dalam akses teknologi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam partisipasi masyarakat dalam kegiatan Seni.

**e. Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan dukungan pemerintah yang mendukung pengembangan seni dan budaya, seperti pendanaan untuk program seni, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain , kurangnya dukungan dapat menghambat perkembangan seni dan budaya di suatu wilayah . Permasalahan perkembangan budaya dan seni serta laju pertumbuhan inspirasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi, pendidikan, budaya lokal, teknologi , dan kebijakan pemerintah. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengembangkan seni dan budaya di masyarakat .

**Upaya untuk pembaharuan Pendidikan**

**1. Upaya Pembaruan Pendidikan**

Pembaruan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Usaha pembaruan pendidikan meliputi:

**a) Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran**

Memanfaatkan teknologi seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar di berbagai lokasi dan waktu.

**b) Pendidikan Karakter Selain fokus pada pengetahuan akademis**

Pendidikan juga dituntut untuk membentuk karakter siswa yang baik, seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati. Program pendidikan karakter sering kali diintegrasikan dalam kegiatan belajar sehari-hari.

**c) Peningkatan Kompetensi Guru**

Melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan , diharapkan guru dapat menerapkan pendekatan pengajaran yang lebih efektif serta inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini.

**d) Pendekatan Holistik**

Pendidikan mulai melihat siswa secara keseluruhan, bukan hanya dari aspek akademis tetapi juga emosional, sosial, dan fisik. Pendekatan ini menekankan keseimbangan dalam perkembangan siswa.

**2. Perubahan Kurikulum**

Kurikulum merupakan dasar dari sistem pendidikan, dan perubahan kurikulum yang dilakukan bertujuan untuk memastikan pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan. Upaya – upaya yang umumnya dilakukan dalam hal ini mencakup:

**a) Kurikulum Berbasis Kompetensi Perubahan**

Menekankan keterampilan praktis dan kompetensi utama yang dibutuhkan di dunia nyata, contohnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan komunikasi. Kurikulum ini bertujuan agar siswa memiliki kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja .

**b) Kurikulum yang Fleksibel dan Adaptif**

Memberikan kepada kebebasan sekolah dan guru untuk mengembangkan konten terbuka berdasarkan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Di Indonesia, contoh dari ini adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang memberikan ruang kepada guru dalam menyusun metode dan materi pembelajaran.

**c) Integrasi Pembelajaran Interdisipliner**

Kurikulum yang mencakup beberapa disiplin ilmu dalam satu pembelajaran untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif . Misalnya pelajaran sains yang digabungkan dengan matematika dan teknologi, atau pembelajaran sejarah yang terintegrasi dengan karakter.

**3. Pengelolaan Pendidikan Inovatif**

Pengelolaan pendidikan yang inovatif bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Langkah-langkah inovatif dalam pengelolaan pendidikan meliputi :

**a) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

MBS memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan ini, sekolah memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan konteks mereka.

**b) Pemanfaatan Teknologi dalam Manajemen Pendidikan**

Memanfaatkan sistem digital untuk mempermudah administrasi sekolah, pengelolaan keuangan , serta evaluasi kinerja. Contohnya, aplikasi untuk absensi siswa dan platform manajemen pembelajaran (LMS) untuk mendukung perkembangan siswa.

**c) Pengembangan Kemitraan dengan Industri dan Pihak Eksternal**

Untuk meningkatkan relevansi proses belajar , beberapa sekolah mewujudkan kerja sama dengan industri , perguruan tinggi, serta lembaga nirlaba. Kerja sama ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dari dunia kerja atau berbagai proyek sosial

**d) Inovasi dalam Penilaian dan Evaluasi**

Pengelolaan pendidikan inovatif juga mencakup pengembangan metode penilaian baru yang lebih terfokus pada kemampuan aplikatif siswa, seperti penilaian berbasis proyek dan portofolio .

**4. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah**

Pendidikan luar sekolah (PLS) bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal atau yang memerlukan pendidikan tambahan. Upaya-upaya dalam pengembangan PLS mencakup :

**a) Program Keaksaraan dan Pendidikan Dasar Fungsional**

Pendidikan keaksaraan berfungsi dalam mengatasi buta huruf di kalangan masyarakat dewasa, sementara pendidikan dasar fungsional masyarakat membantu memperoleh keterampilan dasar yang berhubungan dengan kehidupan sehari -hari.

**b) Pelatihan Keterampilan Hidup**

Penekanan pada keterampilan praktis, seperti keterampilan wirausaha, manajemen keuangan sederhana, dan kemampuan komunikasi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka

**c) Komunitas Pendidikan Berbasis**

Program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas setempat. Misalnya saja , di wilayah pertanian, PLS dapat menyelenggarakan kursus tentang teknik pertanian modern .

**d) Pemberdayaan Masyarakat**

Pendidikan luar sekolah juga mengarah pada pemberdayaan, dengan memberikan keterampilan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat, seperti pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga dan remaja yang putus sekolah. Upaya-upaya di atas bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih

inklusif, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya pembaruan dan inovasi ini, pendidikan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter.

#### 4. KESIMPULAN

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam mencetak generasi yang cerdas, kritis, dan kompeten, yang siap menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks ini, pokok pendidikan di Indonesia mencakup berbagai elemen yang saling terkait, mulai dari kurikulum, kebijakan pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan itu sendiri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan agar sesuai dengan perkembangan global, sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata.

Kurikulum pendidikan Indonesia yang selalu mengalami perubahan menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan zaman, termasuk penerapan pendidikan berbasis teknologi dan penguatan karakter bangsa. Meskipun demikian, implementasi kurikulum yang terus berkembang seringkali menemui kendala dalam hal infrastruktur, ketersediaan sumber daya pengajaran, serta ketimpangan antara daerah maju dan daerah terpencil.

Dalam hal pemerataan, meskipun pemerintah sudah memberikan berbagai kebijakan dan bantuan, seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Kesenjangan antara kota dan desa, serta antara sekolah negeri dan swasta, juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih.

Selain itu, kualitas tenaga pendidik di Indonesia juga menjadi pokok penting yang tidak dapat diabaikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi harus terus didorong, mengingat peran guru sebagai ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam hal kesejahteraan guru dan distribusi tenaga pendidik yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga merata dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan masa depan. Untuk itu, penguatan pendidikan karakter, penyempurnaan kurikulum, pemerataan akses

pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru menjadi langkah-langkah yang harus diutamakan dalam upaya memperbaiki pendidikan di Indonesia ke depannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mulyasa, E. (2013). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pannen, P., & Purwanto, D. (2019). E-Learning: Konsep, Strategi, dan Implementasi.
- Sanjaya, W. (2021).Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Suryadi, A., & Tilaar, H.A.R. (2008). Pendidikan Luar Sekolah: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sutrisno, E., & Ali, M. (2020).Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Tilaar, H.A.R. (2016).Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- UNESCO (2017).Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO Publishing.